JAZIRAH
JURNAL PERADABAN DAN KEBUDAYAAN
Sekolah Tinggi Ilmu Adab dan Budaya Islam Riyadul 'Ulum
e-jurnal.stiabiru.ac.id
ISSN: 2716-4454

PEMIKIRAN DELIAR NOER MENGENAI GERAKAN ISLAM MODERN INDONESIA 1900-1942

Irpan Iskandar[a], Dede Wahyu Firdaus[b]
irpaniskandar@stiabiru.ac.id, dede.firdaus@unsil.ac.id

[a]Prodi Sejarah Peradaban Islam, STIABI Riyadul 'Ulum Tasikmalaya, Indonesia.
[b]Prodi Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Siliwangi, Indonesia.

ARTICLE INFO

Received: 2nd March 2020
Revised: 16th September 2020
Accepted: 5th October 2020
Published: 2nd December 2020

Permalink/DOI

10.51190/jazirah.v1i1.2

Copyright © 2020, *Jazirah: Jurnal Peradaban & Kebudayaan*.
All right reserved

Print ISSN: 2716-4454

ABSTRAK

Deliar Noer adalah seorang ilmuwan bidang politik dan sejarah Islam di Indonesia abad ke-20. Pemikiranya mengenai gerakan modern Islam Indonesia 1900-1942 telah memberikan sumbangsih keilmuan dan menjadi rujukan studi Islam di Indonesia Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran seorang Deliar Noer dalam bukunya yang berjudul "Gerakan Islam Modern Indonesia 1900-1942". Metode yang digunakan dalam artikel ini yaitu menggunakan metode penelitian literature review. Hasil penelitian menunjukan bahwa; (1) awal gerakan Islam modern muncul dari pengaruh para ulama yang belajar ke Timur Tengah, hingga pemikiran-pemikiran Islam modern ini menyebar ke berbagai daerah di Hindia Belanda dengan metode keorganisasian, pendidikan, dan pers. (2) Gerakan Islam modern di Indonesia dapat dibedakan atas gerakan sosial pendidikan, politik, dan ekonomi. (3) perkembangan gerakan Islam modern mengalami dinamika dan reaksi yang muncul baik dari pemerintah kolonial Belanda, kalangan Islam tradisional, maupun kalangan kebangsaan dan nasionalis.

KATA KUNCI
*Deliar Noer, Gerakan Modern, Islam In*donesia.

ABSTRACT

Deliar Noer is Indonesian scholar in the field of Islamic politics and history in 20th century. His thoughts on the modern Indonesian Islamic movement 1900-1942 have made scientific contributions and become a reference for Islamic studies in Indonesia. The writing of this article aims to analyze the thoughts of a Deliar Noer in his book entitled "Modern Indonesian Islamic Movement 1900-1942". The method used in this article is a literature review research method. The results showed; (1) the beginning of the modern Islamic movement emerged from the influence of the ulama who studied in the Middle East, until modern Islamic thoughts spread to various regions in the Dutch East Indies using organizational, educational, and press methods. (2) Modern Islamic movements in Indonesia can be distinguished into social education, political and economic movements. (3) the development of the modern Islamic movement experienced dynamics and reactions that emerged from the Dutch colonial government, traditional Muslim circles, as well as national and nationalist circles.

KEYWORDS
Deliar Noer, Modern Movement, Indonesian Islam

PENDAHULUAN

Awal abad 20 terjadi reformasi dan modernisasi gerakan Islam di Indonesia. Hal ini ditandai dengan berdirinya beberapa organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Persatuan Ulama, Persatuan Islam, Sarekat Islam. Berdirinya organisasi-organisasi tersebut merupakan suatu tanda bahwa awal abad 20 muncul kesadaran baru dan cita-cita besar yang direalisasikan kepada pembentukan organisasi yang bersifat modern. Kesadaran dan cita-cita ini muncul ketika ulama-ulama di Indonesia pulang dari Mekkah bersamaan dengan sedang berkembangnya paham Pan-Islamisme dan Wahabi. Pasha dan Darban berpendapat bahwa kesadaran yang terbangun adalah keyakinan bahwa cita-cita yang besar dan berat dapat direalisasikan dengan organisasi yang efektif dan efisien (dalam Padmo, 2007, hlm. 153).

Buku Deliar Noer yang berjudul "Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942" diterbitkan oleh LP3S tahun 1980 memotret segala fenomena yang terjadi di masa-masa penentuan dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Buku ini adalah terjemahan dari disertasinya "*The Rise and Development of the Modernist Movement in Indonesia*" dan menjadikan Deliar Noer sebagai orang Indonesia pertama meraih gelar doktor Ilmu Politik dari Universitas Cornell, Ithaca, Amerika Serikat. Buku ini menarik dan relevan untuk dikaji untuk membaca pola-pola gerakan Islam modern yang terjadi pada masa kini dan masa depan berdasarkan apa yang diwariskan dari masa lalu.

Periode tahun 1900-1942 merupakan periode dimana arus modernisasi baik dalam pemikiran dan maupun gerakan keorganisasian untuk menentang praktik Kolonialisme dan Imperialisme mulai bermunculan baik di Eropa, Timur Tengah, Asia, hingga masuk ke Hindia Belanda. Pengaruh gerakan modern dari luar tersebut menjadi salah satu faktor timbulnya pergerakan nasional menuju kemerdekaan. Hindia Belanda periode 1900-1942 merupakan periode pergerakan nasional menuju kemerdekaan dimana organisasi-organisasi modern yang berbasis keagamaan, nasionalis, hingga komunis. Meski pada tahun 1942 di Hindia Belanda terjadi pergantian kekuasaan di Hindia Belanda dari tangan Belanda ke tangan Jepang. Pemikiran, gerakan, dan perkembangan yang umumnya bersangkutan dengan gerakan Islam modern tidak berhenti dengan adanya pergantian ini. Gerakan Islam modern masih terus berlanjut, bukan saja pada masa Jepang melainkan juga sesudah merdeka, hingga saat ini. Menurut Deliar Noer (1990) bahwa yang membedakan masa tahun 1900-1942, dengan sesudah merdeka adalah bukan sekedar pergantian kekuasaan dari tangan satu ke tangan lainnya, melainkan bagaimana cara pandang mereka dalam melihat dan berhadapan dengan kelompok lain.

Perkembangan pemikiran, gerakan, cara memandang permasalahan, dan sikap berorganisasi mereka seperti apa yang diungkapkan pemikiran Deliar Noer melalui bukunya masih sangat relevan hingga masa kini. Meskipun terjadi perubahan gerakan pada masa awal pemerintahan Orde Baru dimana organisasi-organisasi modern yang ada pada masa pergerakan nasional tidak lagi

mendominasi. Hal ini menurut Wasito (2016, hlm.248), terjadi karena pada tahun 1970-an muncul gerakan Islam kontemporer, yaitu gerakan yang muncul dalam satu *setting* kehidupan masyarakat Indonesia yang sedang mengalami intensifikasi modernisasi.

Dalam tulisan ini digunakan beberapa hasil penelitian yang relevan guna membantu, membandingkan, dan membedakan penelitian ini dengan hasil penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Berkaitan dengan gerakan Islam modern di Indonesia, telah dilakukan beberapa penelitian, antara lain oleh Imas Emalia (2016). Menurutnya awal abad ke-20, perkembangan pers yang dikelola masyarakat adat berkembang lebih cepat dari sebelumnya, sebagai akibat fakta bahwa pers menjadi alat perjuangan yang digunakan oleh banyak organisasi sosial, politik, dan keagamaan. Perkembangan organisasi keagamaan, terutama di Jawa dan Sumatra, sangat penting karena pers digunakan sebagai sarana untuk perjuangan tentang masalah agama dan diperluas lebih jauh pada masalah sosial, ekonomi, dan politik. Perkembangan ini dapat diamati dengan munculnya majalah Islam yang dipelopori oleh "Al-Moenir" (Pencerahan), pada tahun 1911-1916, yang beredar di Sumatera Barat. Majalah ini diterbitkan oleh penerbitan "Imam" (Pemimpin), pada tahun 1906-1909, yang diedarkan di Singapura. Sementara di Jawa, organisasi Islam seperti SI (Sarekat Islam atau Liga Islam), Muhammadiyah (Pengikut Nabi Muhammad), dan PO (Persjarikatan Oelama atau *Islamic Scholars League*) juga secara aktif memanfaatkan koran dan majalah sebagai alat perjuangan mereka. Melalui berita dan pandangan, pers Islam meminta orang untuk mengikuti kemajuan. Melalui pers Islam, orang juga diminta untuk belajar sains, agama, dan diberi kesadaran akan nasionalisme.

Penelitian Saeful Rohmat (2015) menjelaskan bahwa ada tiga paradigma utama yang saling bersaing dalam hubungan antara agama, khususnya Islam, dan negara, yaitu: paradigma sekuler, paradigma ideologis Islam, dan paradigma "*fiqh*". Dalam hal ini, kaum Muslim tradisionalis, terutama pengikut Nahdlatul Ulama (NU), yang mengadopsi paradigma "*fiqh*", dapat mengembangkan sudut pandang yang fleksibel mengenai peran Islam di Indonesia dibandingkan dengan Islam modern. Sehingga paradigma ideologis Islam tradisi fleksibel dari membenarkan Republik Indonesia untuk mendukung sebuah negara Islam dan, kemudian, lagi mendukung negara sekuler. Hal ini disebabkan paradigma "*fiqh*" yang mengakui sistem politik yang ada, sambil berusaha memperbaikinya pada saat bersamaan.

Penelitian Ishomudin (2014) menjelaskan bahwa organisasi Islam terbesar di Indonesia adalah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Kedua komunitas ini baik Muhammadiyah maupun NU berada di posisi yang sama, yaitu tidak ada perbedaan dalam penggunaan segala bentuk perkembangan dan kemajuan ada sebagai faktor penentu perkembangan pemikiran keagamaan, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan berkembang di Indonesia. Kedua organisasi Islam tersebut tidak memiliki perbedaan prinsip perbedaan yang paling menonjol terlihat dalam hubungan antara pengikut dan pemimpin. Hubungan antara pengikut dan pemimpin

di Muhammadiyah adalah kesetaraan, Sedangkan di NU secara umum lebih stratifikasi (hierarki). Setiap pengikut akan mempengaruhi pola perilaku mereka dengan beberapa cara, termasuk orientasi atau aspirasi politik mengenai orientasi aspirasi politik (partai politik). Terdapat perbedaan antara Muhammadiyah dan NU. Perbedaannya karena sifat yang berbeda dari dasar karena pengaruh sejarah organisasi dan tingkat masyarakat serta model dari hubungan antara pengikut dan pemimpin di organisasi mereka masing-masing. Mengenai Pemilihan partai, anggota Muhammadiyah lebih rasional sedangkan pada NU umumnya lebih emosional dan untuk organisasi dan kiai (ulama).

Terakhir penelitian Dudung Abdurahman (2017) menjelaskan bahwa pertama, perkembangan Islam selalu menyesuaikan diri dengan budaya lokal. Kedua, pembangunan Islam lokal yang sedang berjalan dan juga berubah karena pengaruh budaya Barat dan reformasi di dunia Islam. Ketiga, melanjutkan pertemuan keragaman Islam kontemporer, karena perkembangan multikulturalisme modern. Selain itu, integrasi perspektif dalam menjelaskan Islam dapat menghasilkan pengetahuan tentang "*historis-multikultural*", yaitu Islam pada kenyataannya, perbedaan, dan keragaman yang terjadi dan diakui oleh masyarakat Muslim dalam kurun waktu tertentu. Pengetahuan yang berbasis pada "*historis-multikultural*" juga bisa dijadikan wacana untuk memecahkan masalah manusia yang selalu muncul di masa kini dan masa depan.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah *literature review*. Metode *literature review* adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan sumber data yang berhubungan pada sebuah topik tertentu yang bisa didapat dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, makalah, dan sumber pustaka lainnya (Marzali, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Singkat

Sebelum menjelaskan pemikiran Deliar Noer dalam bukunya yang berjudul “Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942” yang diterbitkan LP3ES tahun 1990, alangkah baiknya diuraikan terlebih dahulu biografi dan beberapa karyanya. Hal ini penting karena latar belakang kehidupan seseorang akan memperlihatkan bagaimana orang tersebut menulis karyanya (Mulyana, 2009, hlm. 123).

Deliar Noer lahir di Medan pada 9 Februari 1926, adalah seorang ahli politik dan sejarah Islam Indonesia. Ia adalah orang Indonesia pertama yang meraih doktor politik dari Universitas Cornell, Ithaca, New York, Amerika Serikat. Kehidupan Deliar Noer tidak pernah jauh dari nuansa keIslaman, ia tumbuh besar di keluarga Minangkabau. Deliar Noer remaja berangkat ke Jakarta untuk melanjutkan sekolah, akan tetapi situasi kondisi Jakarta menyebabkan ia terjebak dalam kondisi revolusi Indonesia. Di masa revolusi ia pernah menjadi penyiar Radio Republik Indonesia (RRI) dan menjadi sekretaris perdagangan pemerintah Indonesia di Singapura. Setelah berakhir masa revolusi, ia bekerja di Departemen Luar Negeri dan menjadi

guru SMA Muhammadiyah. Kemudian pada tahun 1950 kuliah di jurusan sosial ekonomi politik Akademi Nasional.

Pada awal tahun 1950-an, Deliar Noer menjadi aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dari ketua cabang HMI Jakarta hingga Ketua Umum Pengurus Besar HMI. Kemudian ia bekerja di Pers Biro Indonesia, dan menjalin hubungan dengan Mohammad Hatta dan mendirikan Partai Demokrasi Islam Indonesia. Tahun 1958 lulus Sarjana Muda dari Fakultas Sosial Ekonomi Politik Universitas Nasional Jakarta. Gelar M.A dan Ph.D di bidang Ilmu Politik diperoleh tahun 1960 dan 1963 dari Universitas Cornell, Ithaca, New York, Amerika Serikat.

Tahun 1963, Deliar Noer menjadi dosen pada Universitas Sumatera Utara Medan, dan dua tahun kemudian diberhentikan oleh Syarief Thayeb sebagai Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan karena dituduh subversif dan dianggap sebagai kaki tangan Amerika Serikat.

Pada awal pemerintahan Orde Baru tahun 1967-1974, Deliar Noer diangkat sebagai Rektor IKIP Jakarta, dosen fakultas Ilmu-Ilmu Sosial UI, dan staf penasehat Presiden Soeharto namun mengundurkan diri karena perbedaan pandangan dan ideologi. Selain itu, Tahun 1966-1968 menjadi anggota Staf Pribadi dan tim ahli Ketua Presidium Kabinet serta Anggota Tim Ahli Komando Operasi Tertinggi (KOTI). Menjadi Dosen tidak tetap tetap pada Seskoad, Seskoal, Seskoau dan Lemhanas tahun 1966-1972. Hingga tahun 1974, Deliar Noer diberhentikan sebagai rektor IKIP Jakarta dan dilarang mengajar di Indonesia karena kritiknya terhadap peristiwa Malari. Setelah dilarang mengajar di Indonesia, Deliar Noer menerima tawaran menjadi peneliti di Australian National University (ANU), dan menjadi dosen tamu di Universitas Griffith, Australia.

Beberapa karya tulisnya adalah Administrasi Islam Indonesia (1983), Islam, Pancasila dan Asas Tunggal (1983), Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965 (1987), Perubahan Pembaruan, dan Kesadaran menghadapi abad-21 (1988), Gerakan Modern Islam Indonesia 1900-1942 (1990), Mohammad Hatta: Biografi Politik (1990), Otobiografi Deliar Noer (1996), Membicangkan Tokoh-Tokoh Bangsa (2001), Mencari Presiden (2001), Mohammad Hatta: Hati Nurani Bangsa 1902-1980 (2002), Islam dan Masyarakat (2003), Islam dan Politik (2003).

Tinjauan Metodologi Buku Gerakan Modern Islam Indonesia 1900-1942

Buku Gerakan Modern Islam Indonesia 1900-1942 (1990), diterbitkan dari disertasi Deliar Noer di Universitas Cornell, Ithaca, Amerika Serikat. Adapun tinjauan metodologi sejarah terhadap buku ini, Taufik Abdullah (dalam Mulyana, 2009, hlm. 124) menjelaskan bahwa pengerjaan sejarah sebagai usaha rekonstruksi hari lampau itu hanyalah mungkin dilakukan apabila “pertanyaan pokok” telah dirumuskan. Dalam usaha mencari jawaban atas pertanyaan pokok itulah ukuran penting atau tidaknya bisa didapatkan.

Untuk menganalisis metode yang digunakan dalam buku ini, Deliar Noer mengawalinya dengan pertanyaan pokok yang merupakan rumusan masalah dari

penelitiannya, yaitu pertama, bagaimana asal-usul gerakan modern islam di Indonesia? kedua, bagaimana sifat gerakan pemikiran pembaharuan islam? Dalam menjawab pertanyaan tersebut, Deliar Noer menggunakan metode Deskriptif Analitis dengan menggunakan pendekatan sejarah dan sosiologi.

Pengkajian masalah berdasarkan pendekatan sejarah akan menghasilkan karya sejarah dalam dua sifat pengertiannya yang berbeda. Pertama, sejarah dalam arti subjektif yaitu memperlihatkan cerita sejarah, pengetahuan sejarah dan gambaran sejarah yang memuat unsur-unsur dari isi pengarang, sehingga di dalamnya memuat sifat, gaya bahasa dan struktur pemikirannya. Kedua, sejarah dalam arti objektif, yaitu merujuk kepada kejadian atau peristiwa itu sendiri, dan proses sejarah digambarkan dalam aktualitasnya.

Deliar Noer sendiri menulis buku Gerakan Modern Islam di Indonesia membutuhkan sumber-sumber terutama sumber sejarah. Sumber sejarah merupakan sesuatu yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan informasi kepada peneliti tentang peristiwa yang terjadi di masa lalu. Sumber-sumber sejarah merupakan bahan-bahan mentah sejarah yang mencakup segala macam evidensi yang telah ditinggalkan oleh manusia yang menunjukan segala aktivitas mereka di masa lalu yang berupa kata-kata yang tertulis atau kata-kata yang diucapkan (Sjamsuddin, 2007, hlm. 95).

Kedudukan sumber sejarah sangat penting bagi sejarawan, dengan sumber sejarah inilah para sejarawan dapat mengetahui kenyataan sejarah. Tanpa adanya sumber, sejarawan tidak akan bisa mengkaji apa-apa tentang masa lalu, sebaliknya tanpa sentuhan sejarawan, sumber sejarah belum tentu dapat dikaji. Deliar Noer menggunakan sumber primer dan sekunder baik yang ditulis dalam bahasa Indonesia maupun bahasa yang ditulis dalam bahasa asing seperti bahasa Inggris dan Belanda. Dalam penelitiannya ia menggunakan berbagai macam sumber seperti surat kabar, majalah, buku, dokumen, brosur dan pamflet sezaman. Dari penggunaan sumber-sumber tersebut, Deliar Noer berhasil menjelaskan gerakan modern islam di Indonesia dengan baik sehingga mudah dimengerti bagi para pembacanya.

Selain itu, Deliar Noer dalam bukunya menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan sejarah dan pendekatan sosiologi. Dengan pendekatan sejarah dihasilkan pembahasan menurut urutan peristiwa secara kronologis dan dapat dibuktikannya keberadaanya dalam sejarah (Kartodirdjo, 1993, hlm. 146-145). Pendekatan sejarah sangat dibutuhkan dalam memahami agama, karena agama itu sendiri turun dalam situasi konkret bahkan berkaitan dengan kondisi kemasyarakatan. Sedangkan dengan pendekatan sosiologi dapat dihasilkan deskripsi yang menjelaskan berbagai peristiwa yang satu berkaitan dengan bagian yang lainnya. Selain itu, pendekatan sosiologi adalah cara atau metode yang dilakukan dengan mengaitkannya dengan sosiologi guna menganalisa dan mengungkap data-data terhadap ajaran agama. Perhatian agama terhadap

masalah-masalah sosial mendorong orang-orang yang beragama untuk memahami ilmu-ilmu sosial sebagai alat untuk memahami agamanya.

Suatu teori pada hakikatnya merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Fakta tersebut merupakan sesuatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris. Adapun teori yang digunakan oleh Deliar Noer adalah teori-teori sosial. Teori ilmu sosial yang digunakan Deliar Noer dalam menjelaskan Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942 yaitu teori-teori klasik, seperti Emile Durkheim, Max Weber, Talcott Parson, dan Robert K. Marton. Salah satu pemikiran Durkheim ia fakta sosial atau realitas akan membentuk perilaku individu. Karena itu, Durkheim sering disebut sebagai strukturalis. Berbagai struktur masyarakat dipahami sebagai realitas dan fakta sosial, dan hal ini akan membentuk perilaku individu. Max Weber menganalisis bagaimana pengaruh agama terhadap perilaku ekonomi, khususnya dalam mendorong tumbuhnya Kapitalisme. Situs keagamaan dipahami sebagai pranata sosial yang dipelihara oleh para pemeluknya dalam sebuah komunitas sosial (Haryanto, 2011, hlm. 27-28).

Talcott Parson merupakan salah seorang tokoh fungsional yang lebih menekankan pada keserasian, keteraturan dan keseimbangan dalam sebuah sistem sosial. Sejalan Parson, Robert K. Marton mengembangkan teori fungsionalisme, ia mengemukakan bahwa bila masyarakat merasa puas dengan nilai-nilai yang ada, maka masyarakat akan menghargainya. Nilai yang menjadi patokan bersama merupakan faktor yang dapat mendorong integrasi sosial, pun sebaliknya. Perilaku sosial yang terdapat dalam sebuah komunitas dapat dijelaskan dengan faktor agama. Nilai-nilai agama yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah komunitas merupakan pranata sosial yang akan berpengaruh terhadap realitas perilaku (Haryanto, 2011, hlm. 93-94). Secara singkat dapat dijelaskan bahwa teori fungsionalisme bertujuan untuk meneliti kegunaan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan struktur sosial dalam masyarakat.

Seperti yang sudah di jelaskan Deliar Noer dalam bukunya bahwa kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi, serta gerakan sosial dan politik di Indonesia dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat dengan adanya pembaharuan-pembaharuan Islam saat itu. Selain menggunakan teori-teori sosial dalam kajiannya, Deliar Noer menggunakan teori modernisasi. Modernisasi berarti transformasi sosial, politik, ekonomi, kultural, dan mental yang terjadi di Barat sejak abad ke-16 dan mencapai puncaknya pada abad 19 sampai 20-an. Makna modernisasi paling khusus mengacu pada masyarakat terbelakang atau tertinggal dan melukiskan upaya mereka untuk mengejar ketertinggalan dari masyarakat paling maju (Haryanto, 2011, hlm.123-124). Deliar Noer menggunakan teori ini sebagai acuan dalam menganalisis antara kaum tradisionalis dan modernis melalui perkembangan zaman antara periode baru dan periode lamanya.

1. Awal dan Perkembangan Gerakan Modern Islam Indonesia dalam Pendidikan

Masuk dan berkembang Islam tidak bisa dilepaskan oleh tiga faktor, yaitu pertama, adanya interaksi dagang (ekonomi), Islam mulai masuk sejak terjadinya kontak dagang antara pedagang-pedagang Islam dengan penduduk lokal pada saat itu. Kedua, melalui pendidikan, pendidikan Islam berlangsung tidak terbatas pada suatu tempat dan waktu tertentu, namun dimana dan kapan saja berlangsung kontak antara pedagang mubaligh dengan masyarakat lokal, pada saat itu pula terjadi dan berlangsung pendidikan Islam. Menurut (Wahyuni, 2013, hlm. 135). Adapun materi pendidikan mengenai syahadat, membaca al-Qur'an, nilai-nilai moral dan akhlak yang baik, kemudian diajarkan cara-cara sholat lengkap dengan syarat-syaratnya dan seterusnya.

Ketiga, melalui akulturasi budaya dimana Islam pada perkembangannya selalu menyesuaikan dengan situasi kondisi budaya lokal yang dibuktikan dengan prasasti. Keempat, Pers yang memainkan peran penting dalam modernisasi gerakan Islam di Indonesia. Pada awal abad ke-20 perkembangan pers dikelola masyarakat adat berkembang lebih cepat dari sebelumnya, hal ini karena pers menjadi alat perjuangan yang digunakan oleh banyak organisasi sosial, politik, dan keagamaan.

Menurut Emalia (2016) Perkembangan organisasi keagamaan terutama di Jawa dan Sumatra sangat penting karena pers digunakan sebagai sarana untuk perjuangan tentang masalah agama dan diperluas lebih jauh pada masalah sosial, ekonomi, dan politik. Perkembangan pers dapat diamati dengan munculnya majalah Islam yang dipelopori oleh *al-Moenir*, Sumatera Barat. Di Jawa, organisasi seperti Muhammadiyah, Persyarikatan Ulama, Persis dan Sarekat Islam juga aktif memanfaatkan pers sebagai alat perjuangan. Selain sebagai sarana dakwah, pers dimanfaatkan untuk mengajak masyarakat untuk mengikuti kemajuan dengan mempelajari ilmu pengetahuan dan nasionalisme.

Dengan demikian, masyarakat Islam pada awal abad-30 mulai mengalami kesadaran perlu adanya perubahan, kemajuan, dan reorientasi keIslaman. Kemunculan beberapa gerakan Islam di Hindia Belanda untuk merubah konsep gerakan Islam tradisional dengan gerakan Islam modern, beberapa gerakan Islam modern ini diawali dari wilayah Minangkabau.

Peran Ulama Minangkabau

Minangkabau mempunyai peranan penting dalam menyebarkan pembaharuan Islam ke daerah-daerah lain di Hindia Belanda. Gerakan Islam modern di Minangkabau sulit dilepaskan dari pengaruh para ulamanya yang belajar di Timur Tengah, seperti Syaikh Ahmad Khatib yang belajar di Mekkah dan menjadi imam di Masjid al-Haram. Meski ia tidak kembali ke tanah Minangkabau, namun murid-muridnya menjadi tokoh pembaharu di Minangkabau seperti Syeikh Muhammad Djamil Djambek, Haji Abdul Karim,dan Haji Abdulah Ahmad serta K.H. Ahmad Dahlan di Jawa.

Syekh Thaer Djalaludin menyebarkan gerakan Islam modernnya melalui pendidikan dan majalah al-Imam. Tulisan-tulisan dalam majalah al-Imam seringkali mengkritik gerakan dan praktek tarekat. Majalah al-Imam sendiri disebarkan ke berbagai wilayah di Hindia Belanda seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi dengan menggunakan bahasa melayu.

Haji Abdul Karim Amrulloh, melakukan perjalanan ke berbagai daerah termasuk Jawa. Ia menjalin hubungan dengan K.H Ahmad Dahlan dan mengenalkan Muhammadiyah di Minangkabau pada tahun 1925.

Haji Abdullah Ahmad merupakan pendiri majalah al-Munir di Padang 1911-1916, majalah al-Akhbar 1913, dan redaktur majalah al-Islam tahun 1916 yang didirikan Sarekat Islam. Artikel-artikel majalah Al-Munir banyak berisi tentang masalah-masalah agama, biografi, mazhab, hisab dan ru'yah, masalah duniawi seperti kegunaan majalah, organisasi, dan situasi yang terjadi di Timur Tengah.

Ulama di Minangkabau merupakan sosok sentral. Ulama merupakan tokoh kunci dalam gerakan modern Islam di Minangkabau. Pemikiran-pemikiran ulama di atas dikembangkan dan disebarkan melalui lembaga-lembaga pendidikan dan pers yang didirikannya sendiri. Dalam pergerakan pendidikan, para alim ulama Minangkabau mendirikan lembaga-lembaga pendidikan seperti Sekolah Adabiyah, Surau Jembatan Besi, Sumatera Thawalib, dan al-Irsyad. Pada bidang pers, para alim ulama menyebarkan pemikirannya ke berbagai daerah dan lapisan masyarakat dengan mendirikan majalah dalam bahasa melayu seperti majalah al-Munir yang dalam artikel-artikel nya banyak membicarakan agama, ilmu pengetahuan, dan keduniawian.

Peran ulama dalam mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan majalah (pers) sekurang-kurangnya telah memberikan sumbangsih menyebarkan pembaharuan baik dalam syiar agama Islam maupun sebagai penyebaran pemikiran ulama itu sendiri. Pemikiran-pemikiran yang telah disebarkan tersebut kemudian menjadi cikal bakal gerakan Islam modern di Hindia Belanda ditambah hubungan antara ulama dan murid-muridnya tidak terputus sehingga terjadi keberlanjutan dalam gerakan.

Persyarikatan Ulama (Majalengka)

Gerakan Islam modern di daerah Majalengka ditandai dengan berdirinya Persyarikatan Ulama (PU), pada tahun 1911 atas inisiatif Haji Abdulhalim. Pada awalnya Abdulhalim mendirikan organisasi yang ia bernama *Hayatul Qutub* yang bergerak dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Dalam bidang pendidikan Abdulhalim mulanya menyelenggarakan pelajaran agama sekali dalam seminggu untuk orang-orang dewasa. *Hayatul Qutub* tidak berlangsung lama, persaingan dengan para pedagang Cina seringkali menyebabkan bentrokan hingga pada tahun 1915 organisasi ini dilarang oleh pemerintah Belanda. Meski demikian, kegiatan *Hayatul Qutub* terus dilanjutkan walau tidak memakai nama resmi.

Pada tahun 1916 dirasakan perlu oleh kalangan masyarakat setempat, terutama tokoh-tokoh dan ulama untuk mendirikan lembaga pendidikan modern. Demikianlah sekolah dengan nama *Jami'yat I'anat al-Mutallimin* didirikan dan mendapat sambutan yang baik dari guru-guru di daerah tersebut. Pada masa transisi ini *Hayatul Qutub* merubah nama resminya menjadi Persyarikatan Ulama diakui secara hukum oleh pemerintah pada tahun 1917 atas bantuan H.O.S Tjokroaminoto, pemimpin Sarekat Islam. Pada tahun 1924 Persatuan Ulama melebarkan gerakannya ke seluruh Jawa, Madura, dan tahun 1930 ke seluruh Indonesia. Namun pada kenyataannya, organisasi ini tetap merupakan organisasi daerah Majalengka (Noer, 1990, hlm. 82).

Gerakan Persyarikatan Ulama tidak hanya berkutat pada bidang pendidikan saja, melainkan pada bidang sosial dan ekonomi. Pada bidang sosial Persyarikatan Ulama mendirikan rumah anak yatim piatu, rumah ini dikelola oleh gerakan organisasi perempuan PU yaitu Fattimah. Pada bidang ekonomi, Persyarikatan Ulama mempunyai unit usaha pertanian dan percetakan dengan mengenalkan investasi saham mengelola unit usaha tersebut.

Pada tahun 1932 mengadakan kongres Persyarikatan Ulama di Majalengka, dalam kongres tersebut, Abdulhalim mengusulkan agar sebuah lembaga pendidikan tidak hanya sekedar mengajarkan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum, melainkan harus melatih keterampilan-keterampilan pekerjaan tangan, perdagangan dan pertanian, sesuai dengan bakat dan potensi masing-masing individu. Selain itu, Abdulhalim pula mengusulkan agar keterampilan tersebut agar dibarengi dengan pembentukan watak. Menurut penulis pemikiran Abdulhalim tersebut menjadi cikal bakal adanya pendidikan vokasional atau sekolah kejuruan di Indonesia.

Selain bidang pendidikan, sosial, ekonomi, Persyarikatan Ulama menggunakan pers sebagai bagian dari gerakan. Tahun 1930 Persyarikatan Ulama menerbitkan majalah dan brosur sebagai media menyebarkan pemikiran dan gerakannya. Pada umumnya Abdulhalim berusaha menyebarkan pemikiran-pemikirannya dengan toleransi dan penuh pengertian. Ia tidak pernah mengecam golongan tradisi ataupun orang lain yang tidak sepaham dengannya. Ia pun tidak menolak untuk mengambil contoh lembaga-lembaga pendidikan dari non-Islam seperti konsep Santi Asrama yang memadukan perpaduan antara aspek duniawi dan rohani.

Muhammadiyah

Gerakan Muhammadiyah merupakan sebuah organisasi sosial dan pendidikan Islam di Hindia Belanda. Muhammadiyah merupakan lembaga pendidikan bersifat permanen yang didirikan pada tanggal 18 November 1912 oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta yang merupakan saran dari murid-muridnya dan anggota Budi Utomo (Noer, 1990, hlm. 84). Pendirian Muhammadiyah bertujuan menyebarkan ajaran Nabi Muhammad SAW kepada masyarakat dan memajukan agama Islam

kepada anggota-anggotanya. Untuk mencapai hal tersebut Muhammadiyah mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, mengadakan rapat-rapat dan tabligh dimana dibicarakan masalah-masalah Islam, mendirikan wakaf dan masjid-masjid serta menerbitkan buku-buku, brosur-brosur, surat kabar dan majalah.

Menurut Rusydi (2017) usaha kegiatan Muhammadiyah dapat dikelompokan dalam empat bidang, yaitu: pertama, bidang keagamaan, yang meliputi memberikan tuntunan dan pedoman dalam bidang aqidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Kedua, bidang pendidikan, yang meliputi pendidikan yang berorientasi kepada perpaduan antara sistem pendidikan umum dan sistem pesantren. Ketiga, bidang sosial kemasyarakatan, yang meliputi kegiatan dalam bentuk awal usaha rumah sakit, poliklinik, apotik dan panti asuhan anak yatim. Keempat, bidang politik, dimana Muhammadiyah berpartisipasi di bidang politik dalam bentuk *amar ma'ruf nahi munkar* dan memberikan panduan etika, moral dan *akhlakul karimah* terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan masyarakat.

Dalam mengarahkan kegiatan-kegiatannya, organisasi ini dalam tahun-tahun pertamanya tidaklah mengadakan pembagian tugas yang jelas diantara anggota-anggota pengurus. Hal ini semata-mata disebabkan oleh ruang gerak yang masih sangat terbatas di daerah Kauman, Yogyakarta. Ahmad Dahlan sendiri aktif berdakwah, mengajar di sekolah Muhammadiyah, memberikan bimbingan pada masyarakat agar melakukan kegiatan ibadah serta memberikan bantuan kepada fakir miskin dengan menggalang bantuan untuk kebutuhan mereka. Sifat gerakan sosial pendidikan dari Muhammadiyah memang sudah diletakan pada awal berdirinya.

Pada tahun 1917 Muhammadiyah mulai menyebarkan pemikiran dan gerakan ke berbagai daerah di Hindia Belanda. Atas banyak permintaan dari daerah, Muhammadiyah mendirikan cabang-cabangnya di tiap daerah terutama di Jawa. Untuk menyebarkan ke daerah-daerah terutama ke luar Jawa Muhammadiyah merubah aturan organisasi yang membatasi wilayah gerakan. Hal ini dilakukan tahun 1920 saat bidang kegiatan Muhammadiyah memperluas gerakannya ke seluruh pulau Jawa dan tahun 1921 ke seluruh Nusantara (Noer, 1990, hlm. 87).

Muhammadiyah baru masuk ke Sulawesi Selatan pada tahun 1926, namun Muhammadiyah mampu menarik kaum pedagang, ulama dan bangsawan setempat sehingga mampu berkembang ke daerah pedalaman Sulawesi Selatan. Hal ini sejalan dengan Darmawijaya dan Abbas (2014) yang menjelaskan perkembangan Muhammadiyah di Sulawesi Selatan tidak dilepaskan dari beberapa faktor, yaitu faktor berikut. Muhammadiyah terlibat politik praktis, Muhammadiyah memiliki kemampuan organisasi yang baik, Muhammadiyah konsisten sebagai gerakan pembaharuan, dan Muhammadiyah didukung oleh kaum bangsawan, Haji, keturunan Arab, serta kemampuan dalam mengembangkan amal usahanya. Selain faktor-faktor tersebut, Ahmad Dahlan dan caranya berdakwah memperlihatkan pengertian dan toleransi sehingga Muhammadiyah banyak mendapatkan simpati di berbagai daerah.

Gerakan Muhammadiyah dalam bidang pendidikan adalah dengan memadukan ajaran agama dengan ilmu pengetahuan umum. Pendidikan model tersebut menurut Kuntowijoyo (dalam Wasito, 2016, hlm. 255) merupakan gagasan pendidikan yang mampu mengintegrasikan aspek iman dan kemajuan sehingga dihasilkan sosok generasi Islam terpelajar yang mampu hidup di zaman modern tanpa terpecah kepribadiannya. Lembaga pendidikan Islam modern bahkan menjadi ciri utama kelahiran dan perkembangan Muhammadiyah, yang membedakannya dari pondok pesantren kala itu. Pendidikan modern itulah yang dewasa ini banyak diadopsi baik sekolah terpadu dan pesantren modern.

Kepeloporan pembaharuan Ahmad Dahlan yang menjadi tonggak berdirinya Muhammadiyah juga ditunjukan dengan merintis gerakan perempuan Aisyiah tahun 1917, yang ide dasarnya dari pandangan agar perempuan muslim tidak hanya berada di dalam rumah, tetapi harus giat di masyarakat dan secara khusus menanamkan ajaran Islam serta memajukan kehidupan perempuan. Perintisan ini menunjukan sikap dan visi Islam yang luas dari Ahmad Dahlan mengenai posisi dan peran perempuan, yang lahir dari pemahamannya yang cerdas dan tajdid. Pada tahun 1922 Aisyah resmi menjadi bagian dari Muhammadiyah. Dalam tahun-tahun kemudian, gerakan Aisyah memberikan perhatian kepada anak-anak perempuan remaja, dan dibentuk suatu bagian khusus yaitu Nasyatul Aisyah (Noer, 1990, hlm. 90).

Muhammadiyah sejak berdirinya terutama pada periode kepemimpinan Mas Mansur tahun 1938-1940 telah merumuskan pedoman (*khittah*) Muhammadiyah. *Khittah* ini dirumuskan dan ditetapkan berdasarkan keadaan dan masalah yang dihadapi Muhammadiyah. *Khittah* Muhammadiyah pada tahun 1939-1940 terkenal dalam dua belas langkah Muhammadiyah (dalam Purwo, 2009), yaitu; keimanan, keagamaan, budi pekerti, perbaikan diri, persatuan, keadilan, kebijaksanaan, kemajelisan, penyiaran, pengawal gerakan, dan menyambungkan gerakan.

Persatuan Islam

Persatuan Islam (Persis) didirikan di Bandung pada permulaan tahun 1920-an ketika orang-orang Islam di daerah-daerah lain telah terlebih dahulu maju dan berusaha untuk mengadakan pembaharuan dalam agama. Ide pendirian organisasi ini berasal dari perkumpulan Sumatera yang tinggal di Bandung. Masalah-masalah yang dibahas dalam kelompok diskusi ini lebih mengarah kepada agama, gerakan pers di Sumatera majalah Al-Munir di Padang, pertikaian-pertikaian antara jamaah Al-Irsyad dan Jamiat Khair, serta masalah Komunisme yang telah berhasil memecah Sarekat Islam yang menyebabkan kalangan agama di Bandung resah.

Pada saat mulai berdiri, Persatuan Islam pada umumnya kurang memberikan tekanan bagi kegiatan organisasi sendiri. Persatuan Islam tidak terlalu berminat dalam membentuk cabang-cabang di berbagai daerah ataupun menambah sebanyak mungkin anggota. Pembentukan sebuah cabang bergantung semata-mata kepada inisiatif peminat yang tidak didasarkan kepada suatu rencana yang dilakukan oleh

pimpinan pusat. Perhatian organisasi didasarkan kepada bagaimana menyebarkan cita-cita dan pemikirannya. Hal ini dilakukan dengan mengadakan pertemuan-pertemuan umum, tabligh, dakwah, kelompok-kelompok studi, mendirikan sekolah-sekolah, dan menyebarkan atau menerbitkan pamflet-pamflet, majalah-majalah dan kitab-kitab. Kegiatan-kegiatan tersebut mendapat dukungan dan partisipasi penuh dari tokoh-tokoh pergerakan seperti Ahmad Hassan dan Mohammad Natsir (Noer, 1990, hlm. 97).

Gerakan Persatuan Islam lebih banyak memberikan perhatiannya pada kegiatan-kegiatan pendidikan, tabligh, serta publikasi. Dalam bidang pendidikan Persis mendirikan sebuah madrasah yang mulanya dimaksudkan untuk anak-anak dari anggota Persis. Tetapi kemudian madrasah ini disebarluaskan untuk dapat menerima anak-anak lain. Selain itu Persis juga mendirikan sebuah Pesantren Persis di Bandung pada bulan Maret 1936 untuk membentuk kader-kader yang mempunyai keinginan untuk menyebarkan agama (Noer, 1990, hlm. 101-102).

Beda hal nya dengan Muhammadiyah yang mengutamakan pemikiran-pemikiran baru secara tenang dan damai, Persis seakan gembira dengan perdebatan-perdebatan dan polemik. Sikap menantang dari Persis ini dicerminkan juga dalam publikasinya. Majalah "Pembela Islam" yang terbit di Bandung dari tahun 1929 sampai tahun 1933 dimaksudkan untuk menegakan ajaran-ajaran Islam yang dicekam oleh pihak-pihak lain, juga untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran Persis sendiri. Di samping itu berbagai pamflet, brosur dan buku yang terutama membicarakan masalah-masalah agama ataupun yang mengemukakan laporan tentang perdebatan yang diadakan oleh Persis dengan pihak lain diterbitkan. Majalah "Sual Jawab" yang diterbitkan pada tahun 1930-an mengemukakan artikel-artikel dalam bentuk jawaban terhadap pertenayaan-pertanyaan yang dimajukan oleh para pembacanya yang pada umumnya berkenaan dengan agama (Noer, 1990, hlm. 103-104).

2. Awal dan Perkembangan Gerakan Islam Modern Indonesia dalam Politik

Islam di Indonesia, sejak kedatangannya sudah memainkan peranan politik dan ideologis yang sangat penting dan menentukan jalannya sejarah bangsa Indonesia. Pentingnya arti politik Islam di Indonesia sebagian berakar pada kenyataan bahwa di dalam Islam batas antara politik dan agama sangat tipis. Hubungan antara Islam dan politik tidak dapat dipisahkan, hal dapat dilihat dari dan diamati dari kedudukannya dalam kehidupan masyarakat. Politik adalah hasil dari pemikiran agama agar terciptanya kehidupan yang harmonis dan juga sumber inspirasi kultural. Di Indonesia Islam adalah sebagai jalan hidup dan agama, meskipun proses menyebarkan Islam merupakan suatu proses setahap demi setahap, namun kandungan politik yang ada di dalamnya sudah terasa sejak awal perkembangannya (Effendi 2012, hlm. 91-92).

Selanjutnya Effendi (2012, hlm. 93) juga menuturkan bahwa masuknya Kolonialisme Belanda ke Indonesia telah menghadapi kenyataan bahwa Islam telah

menjadi kekuatan politik yang harus diperhitungkan. Meskipun masuknya Islam tidak dengan sendirinya mempersatukan perlawanan terhadap praktik kolonialisme Belanda, namun pada umumnya perlawanan yang muncul dijumpai diarsiteki oleh umat Islam seperti perang Padri, perang Aceh, Diponegoro, dan lain sebagainya.

Pemikiran antara Islam dan politik di Indonesia seiring dengan perkembangannya, disebabkan oleh beberapa faktor: pertama, Islam Indonesia memiliki prinsip *ukhuwah Islamiyah*, dan didukung oleh pola komunikasi lokal dan internasional. Kedua, politik etis kolonial Belanda tidak memenuhi harapan pemerintah Belanda, alumni-alumni pendidikan politik etis banyak yang berkolaborasi dengan alumni Timur Tengah dan pesantren dalam negeri dalam pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. ketiga, perseteruan politik pada pembentukan Indonesia merdeka, diwarnai dengan argumentasi idealis-filosofis tentang asas dan fondasi negara yang akan didirikan (Syahminan, 2012, hlm. 10-11).

Sarekat Islam

Berbicara asal usul dan pertumbuhan gerakan politik dikalangan umat Islam di Indonesia pada saat itu identik dengan asal usul dan pertumbuhan Sarekat Islam, terutama semenjak dua puluh tahun pertama sejak didirikannya. Pada mulanya organisasi yang didirikan oleh Haji Samanhudi ini bernama Sarekat Dagang Islam (SDI) yang bertujuan untuk memajukan pedagang-pedagang batik dan menghapuskan monopoli Tionghoa. SDI sering disebut sebagai gerakan nasionalis, religius, dan ekonomis. Adapun perkembangan Sarekat Islam dibagi menjadi 4 periode (dalam Noer, 1990), terbagi kepada:

1. Periode 1911-1916
   Sarekat islam didirikan di Solo pada tanggal 11 November 1911. Latar belakang didirikannya organisasi ini adalah terjadinya kompetisi yang meningkat dalam dunia perdagangan dengan golongan Tionghoa dan superioritas orang-orang Tionghoa terhadap orang Indonesia sehubungan dengan keberhasilan revolusi Cina tahun 1911. Selain itu tujuan didirikan SI di Solo untuk menjadikan benteng bagi orang-orang Indonesia yang umumnya pedagang batik. Periode pertama ini ditandai dengan persoalan-persoalan organisasi seperti mencari pemimpin, penyusunan AD/RT, dan hubungan antar organisasi pusat dan daerah.
2. Periode 1916-1921
   Dalam periode ini SI banyak memperhatikan persoalan-persoalan yang terjadi, pertemuan-pertemuan yang dilakukan saat itu disebut kongres saja dan kongres nasional. Pemakaian istilah nasional menurut HOS Tjokroaminoto adalah bentuk usaha untuk meningkatkan seseorang kepada *natie* (bangsa) untuk menuntut pemerintahan sendiri atau sekurang-kurangnya orang-orang Indonesia diberikan hak untuk mengemukakan

suaranya dalam masalah-masalah poltik. Sifat politik SI ini dirumuskan dalam keterangan pokok (Asas) dan Program Kerja.

3. Periode 1921-1927
   Merupakan suatu perubahan SI di dalam perkembangannya: pertama, dijumpai perubahan pada ketengan asas dari partai. Kedua terdapat perpecahan dalam tubuh SI. Ketiga adalah penahanan HOS Tjokroaminoto oleh pemerintah Belanda yang menyebabkan alasan utama untuk mengambil politik hijrah pada tahun berikutnya.
4. Periode 1927-1942
   Tahun 1927 periode transisi untuk mendirikan Partai Sarekat Islam dan menghapuskan struktur lama. Perhatian lebih banyak kepada persoalan-persoalan teori dan falsafah seperti yang tercermin pada tafsir Asas dan Politik Hijrah. Penyebab lain pecahnya SI adalah keputusannya pada tahun 1927 untuk mengeluarkan semua anggota-anggota Muhammadiyah dari lingkarannya. Pembentukan PNI oleh Soekarno menantang kedudukan SI ataupun kepemimpinan Islam umumnya dalam rangka perjuangan kemerdekaan. Posisi penting dari pemimpin-pemimpin PNI di dalam pergerakan kemerdekaan menyebabkan terjadinya dua sayap di dalam lingkungan gerakan itu, yaitu nasionalis Islam di satu pihak, dan nasional netral agama dilain pihak.

Pada umumnya PSI memikirkan pemecahan persoalan ekonomi dan sosial dengan menghubungkannya dengan pedoman-pedoman yang bersifat etis dan juga menolak perbedaan derajat manusia dalam pergaulan hidup bersama dan dalam hukum, serta pendidikan haruslah bersandar kepada asas kebangsaan berdasarkan Islam. Dalam bidang agama, partai ini berusaha untuk tidak membesar-besarkan perselisihan khilafahnya karena perselisihan ini menyebabkan munculnya perpecahan serta lemahnya umat Islam.

Persatuan Muslimin Indonesia

Persatuan Muslimin Indonesia (Permi) mulanya bergerak dalam bidang pendidikan. Permi bertransformasi menjadi sebuah partai politik merupakan hasil usaha dua orang tokohnya bernama Haji Ijas Jakub dan Haji Muchtar Luthfi. Keduanya sebagai alumni pendidikan Mesir.

Permi menjalankan politik non-kooperasi terhadap pemerintahan Belanda. Partai ini mempunyai cita-cita “Islam Mulia” dan “Indonesia Sentosa, Indonesia Merdeka”. Permi mempunyai hubungan erat dengan Partai Nasionalis Indonesia (PNI), hubungan tersebut diperkuat pula dengan kontak pribadi ketika pemimpin-pemimpin Permi seperti Ijas, Muchtar, dan Haji Djalaludin pergi ke Jawa dengan menunjukan ketidaksukaan terhadap Sarekat Islam dan Persis.

Dalam hal keorganisasian, Permi mendirikan cabang-cabang di Sumatera Tengah, Bengkulu, Tapanuli, Sumatera Timur, dan Aceh yang bertujuan untuk mewadahi aspirasi umat Islam di Sumatera setelah mundurnya Sarekat Islam. Hal

tersebut mendapat sambutan positif di Sumatera sehingga menimbulkan kecurigaan dari pemerintah Belanda. Oleh pemerintah Belanda pidato pemimpin-pemimpin Permi dianggap radikal, sebagian tokohnya-tokohnya di penjara, sejumlah guru di bawah Permi dilarang mengajar, dan ketiga tokoh besar Permi seperti Ijas, Muchtar, dan Haji Djalaludin diasingkan ke Digul, Papua.

Gerakan Permi tidak hanya berkutat pada bidang politik saja melainkan pendidikan. Pengaruh Permi dalam bidang pendidikan adalah dengan mendirikan *Islamic College* di Padang. Lembaga tersebut adalah lembaga pendidikan tingkat menengah yang memberi tempat penting bagi ilmu pengetahuan umum dalam kurikulumnya. Permi pula mendirikan gerakan kepanduan yang bernama al-Hilal. Selain itu, Permi aktif dalam bidang ekonomi dan sejalan dengan gerakan *swadeshi* yang menjadi semboyan para tokoh pergerakan nasional. Bahkan pada kongres Permi tahun 1931 menyarankan agar seluruh anggotanya memakai pakaian dan barang-barang hasil produksi bangsa sendiri (Noer, 1990, hlm.173).

Partai Islam Indonesia

Partai Islam Indonesia (PII) didirikan pada 4 Desember 1938. Ketua PII pertama Raden Wiwoho, seorang mantan ketua umum *Jong Islamieten Bond* sekaligus anggota Volksraad. Tokoh-tokoh Muhammadiyah menguasai pimpinan partai baru ini. Tetapi, di setiap cabangnya dipimpin oleh tokoh-tokoh Persatuan Islam. Partisipasi Mas Mansur yang merupakan pimpinan Muhammadiyah pada saat itu menjabat sebagai pimpinan pusat partai sehingga menimbulkan perdebatan di antara anggota-anggota Muhammadiyah. Beberapa anggota menginginkan agar Muhammadiyah memilih sikap netral, dan beberapa diantaranya berpikir bahwa hal tersebut dikembalikan kembali kepada spilihan Mas Mansur. Hingga pada akhirnya Majelis Tanwir Muhammadiyah mengizinkan Mansur duduk dalam pengurus pusat PII (Noer, 1990, hlm. 177).

Gerakan partai ini pada mulanya memberikan perhatian kepada tuntutan Indonesia berparlemen, tetapi pada tahun 1940 partai ini menginginkan Negara kesatuan yang dilengkapi oleh pemerintahan yang demokratis, dengan satu parlemen, dan lembaga-lembaga perwakilan yang dipilih langsung melalui pemilihan umum. Partai ini pula menginginkan kebebasan berpendapat, perluasan hak-hak politik, kebebasan pers. Dalam bidang keagamaan partai ini menginginkan penghapusan aturan-aturan colonial yang menghambat penyebaran Islam. Dalam bidang ekonomi, partai ini menginginkan penghapusan pajak yang memberatkan dan menuntut perlindungan bagi perusahaan-perusahaan milik bumputra dari saingan dan tekanan perusahaan asing.

Kongres PII kedua di Solo tahun 1941 secara resmi mengemukakan kesediaan untuk duduk dalam dewan-dewan perwakilan yang ada, dan mendukung Indonesia berparlemen. Namun gerakan politik PII bersifat kooperatif menjadi suatu penghalang gerakan PII karena terbentur dengan peraturan-peraturan ketat yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda.

3. Hubungan Antara Islam Modern dengan Pemerintah Kolonial Belanda

Sikap Belanda terhadap gerakan Islam di Hindia Belanda cenderung berada di persimpangan jalan. Di satu pihak Islam dilihat sebagai agama oleh karena pemerintah Belanda memilih sikap netral. Tetapi disisi yang lain, pemerintah Belanda bersikap diskriminatif terhadap gerakan Islam dengan memberi kelonggaran kepada misionaris Kristen dengan memberikannya logistik. Selain itu, pemerintah Belanda melarang gerakan Islam untuk menyebarkan ajarannya di daerah yang masih menganut kepercayaan animisme, sebaliknya misionaris Kristen leluasa masuk. Hal ini dilakukan pemerintah Belanda untuk menghilangkan pengaruh Islam dengan proses Kristenisasi. Pemerintah Belanda bersikap demikian karena visi kedatangannya adalah *gold, glory, gospel*.

Untuk menjalankan visinya pemerintah Belanda berupaya menyukseskan kerja para misionaris Kristen di Indonesia dengan memberikan logistik untuk kegiatan misionaris. Karena pada saat itu pemerintah Belanda mendapat tekanan dari partai-partai agama dan parlemen Belanda agar supaya mendukung kegiatan misionaris Katolik Roma dan Protestan di Hindia Belanda (Effendi, 1990, hlm. 97).

Pada tahun 1920-an, organisasi Islam di daerah Priangan, seperti Sarekat Islam dan Persatuan Islam menderita akibat kegiatan-kegiatan organisasi-organisasi yang kelihatannya bersifat Islam tetapi yang sebenarnya organisasi tersebut didirikan oleh pemerintah Belanda dengan maksud memecah belah kelompok Islam (Noer, 1990, hlm. 219). Kemudian, pada tahun 1934 Permi dan Sarekat Islam terkena peraturan larangan terbatas untuk mengadakan rapat. Hanya rapat anggota yang diperbolehkan, dan ini pun dengan izin terlebih dahulu dari pejabat yang bersangkutan yang pada umumnya berusaha mempersukar partai. Bahkan pemimpin-pemimpin Permi keluar masuk penjara dan diasingkan oleh pemerintah Belanda.

Dalam bidang pendidikan, kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap pendidikan Islam pada dasarnya bersifat menekan karena kekhawatiran sifat militant di kalangan terpelajar. Bagi pemerintah Belanda, pendidikan Hindia Belanda tidak hanya bersifat *pedagogis cultural* melainkan *psikologis politis* (Sabarudin, 2015, hlm. 149). Pandangan ini pada satu pihak yang menimbulkan kesadaran bahwa pendidikan dianggap begitu vital dalam upaya mempengaruhi kebudayaan masyarakat. Melalui pendidikan Belanda dapat diciptakan kelas masyarakat terdidik yang berbudaya Barat sehingga lebih akomodatif terhadap kepentingan Belanda. Di lain pihak, pandangan ini juga mendorong pengawasan yang berlebih terhadap perkembangan lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren.

Muhammadiyah dan Sarekat Islam mempergunakan cara-cara Belanda dan cara-cara misionaris dalam membangun organisasi dalam memperbaiki pendidikan dan menambah anggotanya. Dalam politik pihak Islam memulai gerakannya dengan banyak sedikitnya menaruh kepercayaan terhadap Politik Etis, tetapi lambat laun kepercayaan ini hilang akibat kekecewaan yang banyak terjadi. Kekecewaan

tersebut disebabkan oleh tindakan sewenang-wenang dari pejabat pemerintah Belanda untuk menghambat dan memukul gerakan Islam. Usaha berupa jaringan mata-mata, perintah halus, dan kekuasaan luar biasa gubernur jenderal yang memang banyak ditujukan kepada para pemimpin organisasi Islam.

Kekecewaan lain ialah kenyataan bahwa kedudukan kepala-kepala anak negeri tradisional, seperti priyayi dan kepala adat, dilindungi oleh pemerintah. Kepala-kepala anak ini memandang para pemimpin Islam sebagai lawan mereka. Kekecewaan terbesar yang dirasakan oleh kalangan Islam modern terutama mereka yang bergerak dalam bidang politik, ialah penolakan pihak Belanda untuk mendirikan suatu pemerintahan yang bertanggung jawab kepada lembaga perwakilan. Selain itu, kegiatan-kegiatan tabligh sering dibubarkan, banyak madrasah yang ditutup, banyak guru yang dilarang mengajar, dan banyak mubaligh yang diperiksa (Noer, 1990, hlm 335).

Sikap pemerintah Belanda terhadap kalangan tradisi dibandingkan dengan sikap pemerintah Belanda terhadap kalangan Islam modern lebih lunak. Hal ini disebabkan karena kalangan tradisi lebih banyak memperhatikan masalah keagamaan. Politik *Devide et Impera* Belanda cenderung diskriminatif terhadap berbagai golongan. Kepemimpinan kalangan tradisi dalam agama lebih banyak disukai pihak pemerintah Belanda, karena dilihat bahwa golongan tradisi ini lebih menerima *status quo* Belanda. Seiring perjalanannya, sikap pasif kalangan Islam tradisi terhadap pemerintah Belanda perlahan mulai sejalan dengan kalangan Islam tradisional dalam memperjuangkan kemerdekaan.

Reaksi pemerintah Belanda bukan saja ditujukan kepada kalangan modern Islam, akan tetapi pada komunitas Arab di Malang. Pemerintah Belanda menerapkan kebijakan terhadap komunitas Arab di Malang karena ketakutan pemerintah terhadap orang Arab yang identik dengan Islam. Kekhawatiran terjadi karena orang Arab akan mempengaruhi orang-orang pribumi di Malang untuk melakukan perlawanan sehingga akan menjadi ancaman bagi pemerintah. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda dalam bidang sosial adalah *Wijkenstelsel* atau penempatan wilayah tertentu komunitas Arab agar terpisah dari kelompok pribumi. Kebijakan ini sangat merugikan komunitas Arab karena mengganggu proses asimilasi, maka komunitas Arab membentuk PAI (Partai Arab Indonesia) yang bertujuan untuk menentang kebijakan isolasi pemerintah Belanda mengingat bahwa ibu mereka juga berasal dari orang pribumi (Hosniyah, 2016, hlm. 976-977).

4. Hubungan Antara Islam Modern dengan Islam Tradisional

Reaksi terhadap gerakan Islam modern datang dari kalangan adat serta dari kalangan agama yang bersifat tradisi di Minangkabau. Reaksi pertama muncul dari kalangan adat yang dipimpin oleh Datuk Sutan Maharadja. Sedangkan dari kalangan tradisi muncul dari Syeikh Muhammad Sa'ad bin Tanta (Syaikh Munkar) dan Syaikh Haji Muhammad Ali bin Abdul Muttalib (Syaikh Khatib Ali)

Kemunculan gerakan-gerakan Islam modern tidak membuat kalangan Islam tradisionalis berdiam diri dan bersikap statis. Mereka pun mengadakan perubahan-perubahan dan mengorganisasikan dirinya dalam Nahdlatul Ulama (1926) dan Tarbiyah Islamiyah (1929). Perubahan tidak hanya terjadi dalam keorganisasian saja, melainkan dalam pendidikan dengan sekolah berbasis kelas beserta kurikulumnya. Kalangan tradisi ini mengadopsi gerakan modern Islam dalam metode dakwah dan pers. Kalangan Islam tradisional maupun kalangan Islam modern tetap teguh dengan pendiriannya masing, menurut Deliar Noer (1990), terdapat 2 paradigma yaitu Islam tradisional dan Islam modern yang dilihat dari 3 aspek, diantaranya: (1) Semangat pemurnian ajaran, (2) Sikap terhadap tradisi bermazhab, (3) Sikap terhadap perubahan dan rasionalitas. Namun pada dasarnya kedua kalangan ini menyadari bahwa beberapa ajaran mereka mempunyai kesamaan.

Pada tahun 1935 muncul kesadaran untuk persatuan dengan mendasarkan sikap toleransi, sama-sama saudara, dan sama-sama pemeluk ajaran Islam, hingga pada akhirnya terbentuk Majelis Islam A'laa Indonesia (MIAI) pada tahun 1938 yang didukung baik oleh kalangan Islam modern dan Islam tradisional untuk kemerdekaan Indonesia.

Nahdlatul Ulama

Di jawa golongan tradisi tidak pula senantiasa berdiam diri dan bersikap statis. Mereka pun mengadakan perubahan-perubahan dalam kalangan mereka dengan mendirikan sebuah organisasi yang dinamakan Nahdlatul Ulama (NU) sebagai benteng perlawanan terhadap kalangan pembaharu. Organisasi ini didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926 dengan Rois Besar KH. Hasyim Asy'ari. sebagai perluasan dari suatu Komite Hijaz yang dibangun dengan maksud: *pertama*, untuk mengimbangi Komite Khilafat yang secara berangsur-angsur jatuh kepada kalangan pembaharu. *Kedua*, untuk berseru kepada Ibnu Sa'ud penguasa baru di tanah Arab, agar kebiasaan agama secara tradisi dapat diteruskan (Noer, 1990, hlm. 242). Komite Hijaz mengirim delegasi sebagai utusan NU menghadap Raja Saudi. Delegasi yang dipimpin oleh KH. Wahab Hasbullah ini mengajukan protes atas langkah-langkah kerajaan Saudi yang meminggirkan mazhab empat, menggusur pertilasan sejarah Islam, melarang tawassul, melarang ziarah kubur dan lain-lain dengan alasan bid'ah dan syirik.

Kelahiran NU merupakan perjuangan ulama pondok pesantren di awal abad 20 yang berusaha mengorganisir diri dan berjuang melestarikan ajaran Islam Ahlusunnah Waljamaah, sekaligus mengobarkan semangat nasionalisme melawan pemerintah Kolonial Belanda. NU mempunyai visi menjadi wadah dalam tatanan masyarakat sejahtera, berkeadilan dan demokratis bagi jutaan anggotanya. Hal ini diwujudkan dengan mengupayakan sistem kebijakan yang menjamin terwujudnya masyarakat sejahtera, melakukan pemberdayaan dan advokasi masyarakat serta menciptakan manusia yang berakhlakul Karimah. Dalam gerakannya, NU

mencontoh cara-cara kalangan modern dalam berpropaganda, seperti mengadakan tabligh, dan menerbitkan brosur-brosur dan majalah. Gerakan NU tidak hanya dalam bidang agama saja, melainkan dalam bidang pendidikan, ekonomi atau perdagangan, dan politik.

Pada mulanya sikap NU terhadap pemerintah Belanda masuk cenderung pasif, namun dalam masa berikutnya mengambil bentuk partisipasi aktif. Pasrtisipasi aktif ini nampak jelas ketika NU mengeluarkan Resolusi Jihad untuk mempertahankan kemerdekaan. Partisipasi ini kemudian kemudian disalurkan melalui Masyumi, lalu mendirikan parpol secara mandiri. Masyumi adalah partai yang muncul dari proklamasi kemerdekaan yang didasarkan kepada prinsip Islam. Masyumi menjadi partai Islam terbesar sampai tahun 1950-an, namun posisi itu berubah setelah Nahdlatul Ulama meninggalkan Masyumi tahun 1952 (Siregar, 2013, hlm. 69).

Mengenai hubungan NU dan Muhammadiyah pada dasarnya berada di posisi yang sama, yaitu tidak ada perbedaan dalam penggunaan segala bentuk perkembangan dan kemajuan sebagai penentu perkembangan pemikiran keagamaan, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan di Indonesia. Namun, kedua organisasi Islam ini memiliki prinsip perbedaan yang menonjol apabila dilihat dari dalam hubungan antara pengikut dan pemimpinnya. Hubungan pengikut dan pemimpin kedua organisasi massa terbesar ini adalah kesetaraan, sedang di NU secara umum lebih stratifikasi (hierarki). Pola hubungan antara pengikut dan pemimpin tersebut mempengaruhi pola perilaku mereka terhadap beberapa cara, termasuk kepada aspirasi politik. Menurut Ishomudin (2017) dalam pemilihan umum, Muhammadiyah cenderung rasional, sedangkan NU umumnya lebih emosional dan untuk organisasi dan Kiai. Perbedaan ini dipengaruhi oleh sejarah organisasi, tingkatan masyarakat, serta model hubungan antara pengikut dan pemimpin masing-masing.

5. Hubungan Antara Islam Modern dengan Kelompok Nasionalis

Dengan terbentuknya Partai Nasional Indonesia tahun 1927, gerakan modern Islam menghadapi lawan baru yang penting dalam kepemimpinan pergerakan nasional Indonesia pada umumnya. PNI sendiri berumur singkat karena dibubarkan tahun 1931 oleh Pemerintah Belanda, tetapi faham-fahamnya diteruskan oleh partai-partai lain, seperti Partai Indonesia, Pendidikan Nasional Indonesia dan Partai Indonesia Raya, semuanya mengambil sikap netral terhadap agama.

Kalangan nasionalis memilih netral terhadap agama. Hal ini karena pada umumnya mereka adalah hasil pendidikan Belanda, kalangan ini mempunyai konsep kebangsaan yang ditujukan untuk mengikat semua pihak lepas dari soal agama dan etnis masing-masing. Dalam pikiran mereka, paham kebangsaan ini merupakan wahana satu-satunya untuk mengusir penjajahan. Pemikiran-pemikiran ini bukan seluruhnya baru atau bersifat tiba-tiba, karena memang telah dikemukakan berbarengan dengan munculnya gerakan Islam modern (Noer, 1990, hlm. 340).

Dalam konsep kebangsaan, penempatan agama ditempatkan dibawah subordinasi kebangsaan, segalanya didasarkan pada nasionalisme, paham inilah menjadi tujuan akhir. Selain itu, muncul kecaman terhadap beberapa ajaran Islam yaitu penilaian yang mengecilkan arti ibadah dan berbagai kewajiban dengan mengemukakan sifat konservatif, sehingga dianggap tidak sesuai dengan zaman dan hanya menghambat kemajuan, hal inilah yang menyebabkan kesenjangan antara kalangan modern Islam dan kalangan nasionalis. Akan tetapi, Perbedaan-perbedan diatas tidak lantas menyebabkan kesenjangan yang berkepanjangan, kedua kalangan modern Islam dan Kebangsaan dapat bersatu dan bekerjasama dalam menentang praktik Kolonialisme Belanda.

KESIMPULAN

Deliar Noer merupakan sosok ilmuan politik dan sejarah Islam di Indonesia. Karya mengenai gerakan modern Islam Indonesia 1900-1942 telah memberikan sumbangsih keilmuan dan menjadi rujukan studi Islam di Indonesia. Gerakan modern Islam di Indonesia adalah hasil terjemahan dari disertasinya Deliar Noer "*The Rise and Development of the Modernist Movement in Indonesia*". Buku ini memotret fenomena akar gerakan Islam modern di Indonesia sejak awal abad-20. Awal gerakan Islam modern muncul dari pengaruh para ulama yang belajar ke Timur Tengah, hingga pemikiran-pemikiran Islam modern menyebar ke berbagai daerah di Hindia Belanda dengan metode keorganisasian, pendidikan, dan pers. Gerakan Islam modern di Indonesia dapat dibedakan atas gerakan sosial pendidikan, politik, dan ekonomi. Pada perkembangan gerakan Islam modern mengalami dinamika dan reaksi yang muncul baik dari Pemerintah Kolonial Belanda, kalangan Islam tradisional, maupun kalangan kebangsaan dan nasionalis. Meski mendapatkan reaksi dan mempunyai perbedaan dalam cara pandang yang muncul dari kalangan Islam tradisional dan kalangan kebangsaan nasionalis, ketiga kalangan ini pada akhirnya bersatu karena mempunyai tujuan yang sama yaitu kemerdekaan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Ilmiah:

Abdurahman, Dudung. (2017). The Integration Perspectives for Historical Study of Indonesia Islam. *TAWARIKH: International Journal for Historical Studies*, 9 (1), hlm. 9-12.

Darmawijaya., & Abbas, Irwan. (2014). Sejarah Muhammadiyah di Sulawesi Selatan 1926-1942. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 12 (2), hlm. 465-478.

Effendi. (2012). Politik Kolonial Belanda Terhadap Islam di Indonesia dalam Perspektif Sejarah (Studi Pemikiran Snouck Hurgronje). *Jurnal TAPIs*. 8 (1), hlm. 91-122.

Emalia, Imas. (2016). Voices of Islamic Reform: A Study on Islamic Press in Indonesia, 1900-1942. *TAWARIKH: International Journal for Historical Studies*, 7 (2), hlm. 201-224.

Haris, Munawir. (2015). Partisipasi Politik NU dan Kader Muslimat dalam Lintas Sejarah. *Jurnal Al-Tahrir*, 15 (2), hlm. 283-308.

Hosniyah., & Trilaksana, Agus. (2016). Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda Terhadap Komunitas Arab di Malang 1900-1935. *Jurnal Avatara*, 4 (3), hlm. 966-978.

Ishomuddin. (2014). Construction Of Socio-Cultural And Political Orientation Of The Followers of Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama (NU) In The Post Reform Era In East Java Indonesia. *Global Journal of Politics and Law Research*, 2 (2), hlm. 39-51.

Marzali, Amri. (2016). Menulis Kajian Literatur. *Jurnal Etnosia*, 1 (2), hlm. 27-36.

Rusydi, Rajiah, ST. (2017). Peran Muhammadiyah (Konsep Pendidikan, Usaha-usaha di Bidang Pendidikan, dan Tokoh). *Jurnal Tarbawi*, 1 (2), hlm. 139-148.

Rohmat, Saeful. (2015). Nahdlatul Ulama, the Fiqh Paradigm, and the Republic of Indonesia. *TAWARIKH: International Journal for Historical Studies*, 7 (1), hlm. 45-62.

Syahminan, MHD. (2012). Pemikiran dan Gerakan Politik Islam Indonesia. *Jurnal POLITEIA*, 4 (1), hlm. 1-11.

Siregar, Fahmi, I. (2013). Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Masyumi (1945-1960). *Jurnal Thaqafiyyat*, 14 (1), hlm. 88-103.

Sabarudin, Muhammad. (2015). Pola dan Kebijakan Pendidikan Islam Masa Awal dan Sebelum Kemerdekaan. *Jurnal Tarbiya*, 1 (1), hlm. 139-174.

Purwo, Slamet. (2009). *Pendidikan Kemuhammadiyahan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Majelis Dikdasmen PW Muhammadiyah Yogyakarta.

Padmo, Soegijanto. (2007). Gerakan Pembaharuan Islam Indonesia Dari Masa Ke Masa: Sebuah Pengantar. *Jurnal Humaniora*, 19 (2), hlm. 151-160.

Wasito. (2016). Gerakan Sosial Modern Masyarakat Islam di Indonesia. *Jurnal Trisakti*, 27 (2), hlm. 248-266.

Wahyuni, Imelda. (2013). Pendidikan Islam Masa Pra Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Ta'dib*, 6 (2), hlm. 129-144.

Buku:

Noer, Deliar. (1990). *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.

Mulyana, Agus., & Darmiasti. (2009). *Historiografi Indonesia di Indonesia Dari Magis-Religius Hingga Strukturis*. Bandung: Refika Aditama.

Haryanto, Dani.,& Nugroho, Hadi. (2011). *Pengantar Sosiologi Dasar*. Jakarta: PT Prestasi Pustaka Karaya.

Kartodirdjo, Sartono. (1993). P*endekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia Utama.

Sjamsuddin, Helius. (2007). *Metodologi Sejarah*. Ombak: Yogyakarta.